

Rekam Jejak #PahlawanGambut Kalimantan Barat

Ringkasan Upaya Peningkatan Pengelolaan Lahan Gambut dan Kapasitas Pemangku Kepentingan melalui Peat-IMPACTS Indonesia



Latar Belakang

Indonesia, rumah bagi hamparan lahan gambut tropis terluas di dunia, menyimpan potensi luar biasa sekaligus tantangan besar. Lahan gambut, dengan kemampuannya menyimpan karbon dalam jumlah masif, berperan vital dalam menjaga keseimbangan iklim global. Namun, pengelolaan yang tidak berkelanjutan, termasuk konversi lahan dan kebakaran berulang, telah mengubah lahan gambut menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang signifikan.

Kebakaran lahan gambut, yang kerap terjadi di musim kemarau, tak hanya mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem, tetapi juga membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian. Kabut asap tebal yang dihasilkan mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu transportasi, dan menimbulkan masalah pernapasan bagi jutaan orang.

Peat-IMPACTS Indonesia hadir melalui Gerakan #PahlawanGambut sebagai upaya konkret untuk mengatasi permasalahan kompleks ini. Dengan menggabungkan pendekatan teknis dan kelembagaan, proyek ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi lintas sektor, Peat-IMPACTS Indonesia berupaya mewujudkan transformasi lanskap gambut, dari sumber emisi menjadi benteng pertahanan iklim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada lahan gambut.

Sejak tahun 2020, ICRAF Indonesia juga telah melakukan kegiatan riset aksi di Kalimantan Barat (Kabupaten Kubu Raya), dengan tajuk *Improving the Management of Peatlands and the Capacities of Stakeholders in Indonesia* (Peat-IMPACTS). Peat-IMPACTS bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan target NDC, dengan mengurangi emisi dari kebakaran dan pengeringan lahan gambut melalui tata kelola lanskap gambut yang baik, peningkatan kapasitas petani gambut untuk menghasilkan rantai pasokan yang berkelanjutan, tata kelola iklim yang adil dan efektif melalui mekanisme investasi bersama dan ketersediaan pengetahuan mengenai restorasi gambut dan praktik pengelolaan yang mencakup pilihan-pilihan berdasarkan konteks.

Menuju berakhirnya kegiatan Peat-IMPACTS pada bulan Desember 2024. Dirasa penting untuk menampilkan rekam jejak aktivitas kami sepanjang 2020 – 2024 dalam tajuk #PahlawanGambut-Menuju Masa Depan: *Rekam Jejak Peningkatan Pengelolaan Lahan Gambut dan Kapasitas Pemangku Kepentingan di Indonesia Melalui Peat-IMPACTS*. Kegiatan ini sekaligus sebagai media undur diri dari aktivitas lapangan, menyampaikan pertanggungjawaban, serta mendapatkan masukan dari masyarakat di tingkat tapak/desa dan para mitra. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sambung rasa untuk memastikan keberlanjutan program yang telah berjalan.

Strategi

Peat-IMPACTS Indonesia menerapkan strategi implementasi yang komprehensif dan terpadu untuk mencapai tujuannya. Strategi ini mencakup beberapa pendekatan utama:



- **Pendekatan Lanskap.** Pendekatan lanskap yang mempertimbangkan keterkaitan antara berbagai fungsi lahan gambut, seperti produksi, perlindungan, dan konservasi. Upaya pengelolaan lahan gambut diintegrasikan ke dalam tata kelola bentang lahan yang lebih luas untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan antara berbagai kepentingan.



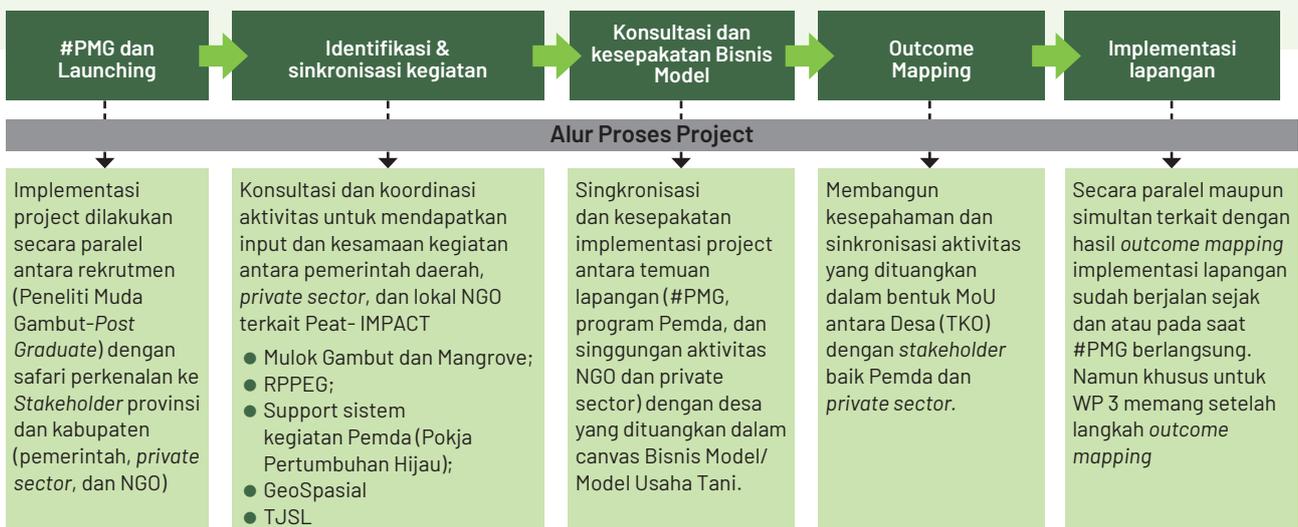
- **Penguatan Kapasitas.** Memberikan pelatihan, lokakarya, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para pemangku kepentingan dalam mengelola lahan gambut secara berkelanjutan.



- **Pengembangan Model Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan.** Mengembangkan model pengelolaan lahan gambut yang efektif, efisien, dan dapat direplikasi di berbagai wilayah di Indonesia. Model ini mempertimbangkan aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan lahan gambut.

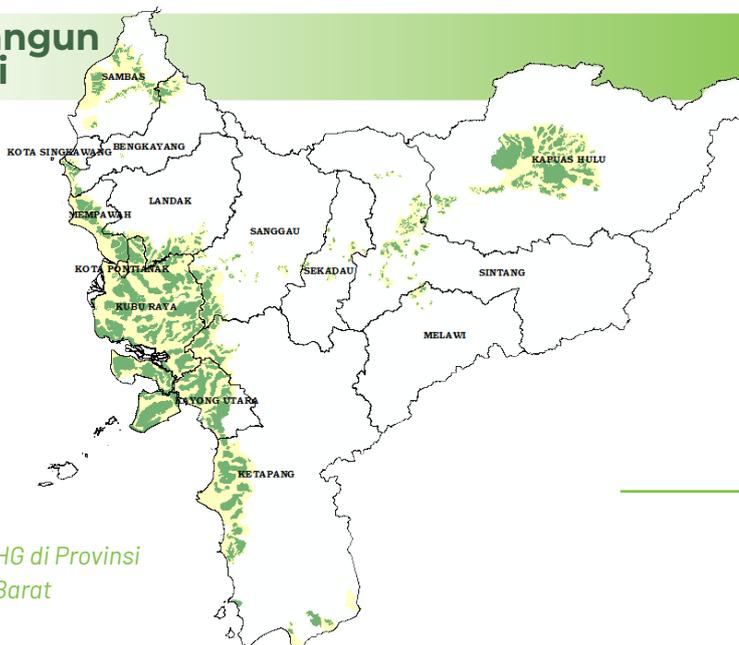


- **Kolaborasi Lintas Sektor.** #PahlawanGambut memfasilitasi kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lahan gambut.



Gambar 2. Tahapan Umum Pelaksanaan Proyek

Membangun Fondasi



Ekosistem Gambut Kalbar Berdasarkan SK MenLHK No. 129/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional.

2,79 Juta hektare Ekosistem Gambut

124 KHG

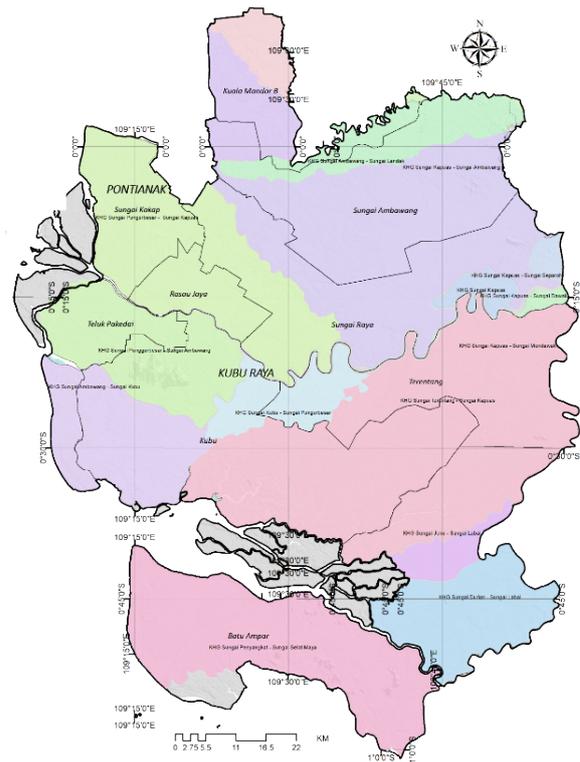
Gambar 3. KHG di Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 1. Distribusi KHG masing – masing kabupaten

Kabupaten/Kota	Luas KHG (ha)	Persen (%)
Bengkayang	72.978	2,60%
Kapuas Hulu	475.960	17%
Kayong Utara	299.942	10,70%
Ketapang	429.877	15,40%
Kubu Raya	791.031	28,30%
Landak	94.358	3,40%
Melawi	14.785	0,50%
Mempawah	131.717	4,70%
Pontianak	11.150	0,40%
Sambas	192.513	6,90%
Sanggau	129.637	4,60%
Sekadau	27.637	1%
Singkawang	3.727	0,10%
Sintang	117.797	4,20%
Total Luas (Ha)	2.796.396	100%

Lahan gambut Kalimantan Barat diperkirakan seluas 2.796.395 hektare yang terbagi dalam 124 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Dari total luas tersebut, 1.678.248 hektare (60%) berfungsi sebagai FEG Budidaya, sedangkan 1.118.147 hektare (40%) memiliki FEG Lindung. KHG terluas adalah KHG Sungai Terentang – Sungai Kapuas dengan luas 186.102 hektare, terletak di Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil pemetaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh sebagian besar kondisi di Kalbar mengalami kerusakan ringan yang mencapai 2.2 juta hektare, sedangkan area gambut dengan kerusakan sangat berat mencapai 7.700 ha, dan area gambut dengan kondisi yang masih baik diperkirakan 2.556 hektare.

Dari total luas lahan gambut di Kalimantan Barat, sebanyak 521,517 hektare (33,69%) berada di Kabupaten Kubu Raya, yang terbagi dalam 16 KHG. Lahan gambut ini mencakup sekitar 63% dari luas wilayah administratif Kubu Raya. Pada tahun 2022, tercatat 18.326 hotspot (titik panas), sedangkan pada tahun 2023 menjadi 62.015 titik, terjadi peningkatan sebesar 43.689 titik. Tahun 2023 tercatat jumlah hotspot terbanyak dalam area KHG Kalimantan Barat selama periode 2013 hingga 2023, yaitu 62.015. Selain itu, lahan gambut yang tergolong tidak rusak hanya seluas 2.556 hektare (0,1%), sementara lahan dengan kerusakan sangat berat mencapai 7.700 hektare (0,3%). Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi proyek Peat-IMPACTS, untuk mengkaji kondisi lahan gambut terkait tujuan dan capaian proyek, guna menghasilkan data dan pengetahuan baru di akhir pelaksanaan proyek.



Ekosistem Gambut Kubu Raya
Berdasarkan SK MenLHK No. 129/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional.

780.561 ha | **15 KHG**
Ekosistem Gambut

Gambar 4. Distribusi KHG masing – masing kecamatan di Kabupaten Kubu Raya

Tabel 2. Kerawanan bencana di Kabupaten Kubu Raya

Kecamatan	Kerawanan Bencana			Grand Total (Ha)
	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	
Batu Ampar	102.133,54	1 15.696,51	21.510,42	239.340,47
Kuala MandorB	6.68,37	21.531,09	17.753,63	39.953,09
Kubu	47.430,24	97.998,75	16.998,04	162.427,03
Rasau Jaya	1.180,20	9.944,00	10.217,89	21.342,08
Sungai Ambawang	14.473,57	55.021,79	3.799.136	107.486,73
Sungai Kakap	24.288,98	2.734.528	6.300,47	57.934,73
Sungai Raya	31.186,12	64.150,46	21.932,78	117.269,35
Teluk Pakedai	18.119,03	1.724.223	2.933,48	38.294,74
Terentang	34.376,46	23.273,70	5.382,49	63.032,66
Grand Total	273.856,51	432.203,80	141.020,56	847.080,87

Implementasi Peat-IMPACTS di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat diawali pada puncak pandemi COVID-19 tahun 2020. Kondisi tersebut merupakan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari proses untuk membangun peneliti muda gambut (60 orang sarjana baru) hingga penggalian data dan informasi. Berbagai cara kerja diuji coba dan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi, dengan tetap dapat menjalankan seluruh kegiatan secara memadai. Hal ini menjadi pembelajaran yang memberikan kesan mendalam kepada seluruh pihak sebagai bagian dari dinamika lapangan, yang menghasilkan data/informasi terkait dengan tata Kelola gambut, baik dari aspek kebijakan, perlakuan dan pemahaman masyarakat, potensi serta komoditas potensial yang ditemukan di lapangan.



Gambar 5. Karantina Peneliti Muda Gambut (PMG) Untuk Mengurangi Penyebaran Covid-19

Assessment of Livelihoods and Landscapes to Increase Resilience (ALLIR) diperkenalkan kepada para peneliti muda gambut untuk melakukan penggalian data dan kerangka analisis yang memadai. Bagian akhir dari proses ini adalah menghasilkan Peta Jalan Desa Gambut Lestari (PEGARI) di wilayah yang masuk dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Kapuas-Sungai Ambawang dan KHG Sungai Terentang - Sungai Kapuas.

Langkah selanjutnya adalah memanfaatkan informasi dari PEGARI untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait temuan lapangan untuk dirumuskan ke dalam model usaha tani. Proses ini mencakup identifikasi dan kesepakatan terkait komoditas yang potensial, rencana peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan, serta penetapan para pihak yang akan dan berpotensi menjadi mitra dalam implementasi program. Selain itu, dibentuk Tim Kerja Desa (TKD) sebagai pelaksana kegiatan di desa, yang pembentukannya sepenuhnya berada di bawah kewenangan desa, baik melalui kepala desa maupun masyarakat desa (kelompok tani dan perorangan).

Berdasarkan hasil penyusunan model usaha tani di tingkat desa maka dilakukan *outcome mapping* dengan melibatkan para pemangku kepentingan. *Outcome mapping* ditujukan sebagai upaya membangun visi bersama, rencana implementasi/kegiatan, serta pembentukan kesepakatan kerja sama antara para pihak. *Outcome mapping* menghasilkan kesepakatan baik yang berbentuk MoU maupun komitmen dari sebagian besar para pihak yang terlibat, baik instansi pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi), *private sector*, lokal NGO, akademisi, maupun perwakilan masyarakat yang lain.

Bersamaan dengan proses pada tingkat desa, berbagai upaya untuk membangun kapasitas di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga dijalankan. Di tingkat nasional dilakukan berbagai kegiatan untuk menggali kontribusi gambut terhadap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di tingkat provinsi dan kabupaten dilakukan berbagai kegiatan untuk memperkuat proses perencanaan daerah dalam pengelolaan gambut berkelanjutan.

Implementasi dan Kolaborasi

Paket Kerja-1

Paket Kerja Pertama berfokus pada penggalian dan analisis data lapangan yang menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai tata kelola lahan gambut tingkat desa, sehingga terbentuk profil desa di kawasan lahan gambut. Penyusunan peta jalan adalah langkah operasional untuk merinci opsi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Peta jalan ini akan mencakup profil KHG, strategi, intervensi, kegiatan, pembagian peran, dan opsi pendanaan. Peta jalan KHG ini terintegrasi dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil lain dari paket kerja pertama adalah peta jalan tata kelola lahan gambut, khususnya di tingkat desa, berbasis KHG dalam bentuk Buku Menuju Desa Gambut Lestari (PEGARI). Di mana pencapaian PEGARI melalui proses klarifikasi, konfirmasi dan konsultasi dengan para pihak baik pemerintah dan masyarakat desa, pemerintah daerah, instansi terkait (kabupaten dan provinsi), sektor swasta, NGO dan akademisi.

Paket Kerja-2

Paket Kerja Dua berfokus pada capaian yang bersifat perencanaan dan kebijakan terkait upaya perlindungan dan pengelolaan gambut, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Di Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove telah ditetapkan dan diterbitkan. Peraturan Daerah tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif berbagai pihak. Peat-IMPACTS mendukung beberapa tahap upaya penyelesaiannya, dan diseminasi terhadap peraturan daerah tersebut.

Tindak lanjut dari peraturan tersebut adalah penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) sebagai panduan upaya pengelolaan berkelanjutan terhadap ekosistem gambut Kalimantan Barat. Proses penyusunan dokumen penyusunan RPPEG Provinsi Kalimantan Barat dikerjakan secara kolaboratif dan dilaksanakan melalui POKJA RPPEG melalui kerja sama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai *leading sector*, melibatkan berbagai Badan/OPD terkait, UPT Kementerian di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, TRGMD, akademisi., NGO/LSM, dan praktisi lainnya, yang dituangkan dalam SK Gubernur tentang Tim POKJA Penyusunan Dokumen RPPEG Provinsi Kalimantan Barat.

Peat-IMPACTS berkontribusi dalam memfasilitasi proses penyusunan, dan mengembangkan kerangka analisis khususnya simulasi perhitungan dampak terhadap skenario RPPEG Provinsi Kalimantan Barat. Informasi ini penting dalam rangka untuk memberikan gambaran bagi para pemangku kepentingan dalam implementasi RPPEG di masa yang akan datang.



Gambar 6. Pengumpulan Data oleh Peneliti Muda Gambut (PMG) di lapangan



Gambar 7. Dokumen Peta Jalan Gambut Lestari (Pegari)



Gambar 8. Penyusunan Dokumen RPPEG Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 9. (a) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang PPEGM; (b) Dokumen RPPEG Provinsi Kalimantan Barat

Di Kabupaten Kubu Raya, upaya perbaikan tata kelola gambut didukung dengan adanya kebijakan yang memadai, untuk itu penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Kubu Raya merupakan hal yang penting sebagai kelanjutan dari RPPEG Provinsi Kalimantan Barat. Proses untuk mengarusutamakan muatan RPPEG ke dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan keuangan merupakan sebuah keharusan, untuk itu berbagai proses untuk pengarusutamaan aspek gambut ke dalam proses RTRW dan RPD Kabupaten Kubu Raya juga telah dilaksanakan.

Pada saat yang sama sebagai basis data/informasi pengelolaan gambut berkelanjutan, Peat-IMPACTS juga mendukung pengembangan Geoportel Satu Data Kubu Raya melalui fasilitasi kegiatan pengumpulan data, dan menyediakan data gambut ke dalam geoportel tersebut.

Paket Kerja-3

Paket Kerja Tiga berfokus pada pengembangan percontohan dan penguatan kapasitas dalam restorasi dan pengelolaan gambut. Beberapa capaian penting paket kerja ini meliputi beberapa hal.

Penyusunan model usahatani yang akan diimplementasikan di masing-masing desa:

Enam desa pilot terpilih, yang masing-masing memiliki potensi berbeda sehingga model usaha tani yang di implementasikan juga berbeda sesuai dengan lima modal penghidupan (sumber daya alam, manusia, sosial, finansial dan fisik) berdasarkan data yang telah dikumpulkan para peneliti muda gambut untuk selanjutnya didiskusikan bersama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dan juga petani di masing-masing desa.

Integrasi kegiatan ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksanaan Pertumbuhan Hijau (P3H) Kubu Raya:

Di Kabupaten Kubu Raya telah dibentuk Pokja P3H yang merupakan platform forum multi pihak. Lebih dari 20 lembaga tergabung dalam Pokja ini sebagai mitra Pembangunan Kabupaten Kubu Raya. Model-model usaha tani, kegiatan pendukung yang berupa peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dan pembangunan demplot telah disampaikan dalam Pokja P3H.

Pembentukan tim kerja desa:

Pembentukan tim kerja di tingkat tapak dilakukan secara partisipatif bersama dengan perangkat desa dan juga petani. Tim kerja desa berperan sebagai implementor di tingkat tapak. Pembentukan tim kerja desa di sepakati bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala desa dan diketahui oleh DPMD kabupaten. Model usahatani yang telah disusun secara bersama-sama pada tingkat kabupaten selanjutnya didiskusikan dengan OPD terkait dan mitra pembangunan bersama tim kerja desa yang telah dibentuk, pembentukan tim kerja desa disepakati bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala desa dan diketahui oleh DPMD kabupaten.



Gambar 10. (a) Kegiatan Penyusunan Dokumen RPPEG Kabupaten Kubu Raya, (b) Dokumen RPPEG Kabupaten Kubu Raya



Gambar 11. Penandatanganan Kesepakatan Penghidupan Berwawasan Lingkungan (KP2BL)



Gambar 12. (a) pengolahan pascapanen kopi, (b) pengolahan pascapanen karet, (c) Pengolahan lahan tanpa bakar, dan (d) Lahan Demplot agroforestri nanas

Kesepakatan penghidupan berwawasan lingkungan merupakan dokumen kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat di dalam tim kerja bersama, penyusunan dokumen ini bertujuan untuk mengukuhkan bentuk dukungan dari berbagai pihak terhadap model usahatani yang berjalan di masing-masing desa pilot.

Desa Pasak. Melalui proses partisipatif, kegiatan di Desa Pasak disepakati untuk diarahkan pada pengembangan komoditas kopi dan karet. Untuk kedua komoditas ini, telah dilaksanakan pelatihan dan diskusi bersama forum Tim Kerja Desa (TKD). Pelatihan pengelolaan pasca panen kopi dilakukan bersama 101 Coffee, sementara pelatihan tata kelola budidaya dan pengolahan pasca panen karet, serta penentuan standar kualitas dan harga karet, dilakukan bersama PT. Bintang Borneo Persada.

Desa Bengkarek. Kegiatan yang dikerjakan di demoplot/ kebun praktik Desa Bengkarek adalah pengembangan komoditas kopi dan karet dengan bekerja sama dengan 101 Coffee dan PT. Bintang Borneo Persada untuk pelatihan dan pendampingan.

TKD Desa Pasak dan Desa Bengkarek membangun kesepakatan dalam bentuk MoU dengan pihak 101 Coffee dan PT. Bintang Borneo Persada. Saat ini, TKD Desa Bengkarek telah berhasil mengimplementasikan MoU, yaitu melalui penjualan karet dengan kualitas Kadar Karet Kering (K3) 50-60% dengan harga sekitar Rp.12.000,-/Kg. Sebagai perbandingan, karet yang biasanya direndam oleh masyarakat umumnya dihargai Rp. 4.000 hingga 6.000,-/ Kg. Penjualan karet oleh TKD kepada PT. Bintang Borneo Persada telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun.

Desa Sungai Asam. Melalui kegiatan demo plot atau kebun belajar, petani di Desa Sungai Asam melakukan penanaman perpaduan tanaman matoa, durian, dan nanas di lahan 0,5 hektare dengan skema perjanjian pinjam pakai. Seiring berjalannya waktu, tanaman tersebut menunjukkan pertumbuhan yang baik. Pembangunan demo plot Sungai Asam mendapat dukungan dari pemerintah daerah, bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kubu Raya dan BPDAS Kapuas dalam pengadaan bibit dan peningkatan kapasitas petani. Selain kegiatan agroforestri di lahan demo plot, di Desa Sungai Asam juga diselenggarakan pelatihan pengolahan limbah daun nanas menjadi serat, serta tenun berbahan benang dari serat daun nanas. Pelatihan ini juga mendapat dukungan dan dilaksanakan secara kolaboratif bersama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta PKK Kabupaten Kubu Raya.

Desa Permata. Desa Permata menentukan komoditas kopi sebagai komoditas unggulan desa. Bersama Peat-IMPACTS, pihak desa mendapatkan dukungan bibit dan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dalam *Good Agriculture Practices* (GAP) atau Praktik Pertanian Baik dan penanganan pasca panen kopi dan petai dalam sistem agroforestri secara ramah lingkungan. Salah satu rangkaian pelatihan adalah mengenai tata kelola perkebunan kopi yang bekerja sama dengan 101 Coffee.



Gambar 13. (a-c) Pelatihan pasca panen kopi dan (d) pengolahan pascapanen karet di Desa Pasak



Gambar 14. Pelatihan budidaya karet, pembuatan pupuk organik, dan budidaya dan pengolahan pascapanen kopi di Desa Bengkarek



Gambar 15. (a-b) budidaya nanas secara agroforestri, (c) pelatihan pembuatan pupuk organik dan (d) demoplot agroforestri nanas di Desa Sungai Asam

Desa Radak Dua. Pemerintah dan masyarakat Desa Radak Dua berkomitmen untuk mengembangkan *agrosilvofishery* melalui penyediaan lahan desa seluas 30 hektare. Lahan yang digunakan sebagai demo plot (kolam dan kebun belajar) memiliki luas 1 hektare dengan sistem Surjan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam GAP dan penanganan pasca panen durian, laban, dan hortikultura dalam sistem *agrosilvofishery* secara ramah lingkungan. Di Desa Radak Dua, ikan yang dibudidayakan adalah mujair, gabus, dan nila, masing-masing dalam kolam yang berbeda.

Dalam mewujudkan kegiatan di Desa Sungai Radak Dua, Peat-IMPACTS berkolaborasi dengan instansi pemerintah Kabupaten Kubu Raya, seperti Bappedalitbangda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Perikanan. Peat-IMPACTS juga berkolaborasi dengan PT. WSL, yang diharapkan dapat membantu dalam manajemen air lahan gambut, dan PT. Panah Merah. Guna memastikan keberlanjutan kegiatan, Peat-IMPACTS bersama Kepala Desa Sungai Radak Dua telah melakukan audiensi dan koordinasi program dengan dinas-dinas terkait di tingkat provinsi, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilibatkan karena terdapat SMKN Pertanian dalam satu hamparan demo plot. Ke depannya, diharapkan adanya kolaborasi yang berkelanjutan antara dinas terkait dengan dunia pendidikan dalam pengelolaan lahan *agrosilvofishery* yang dikembangkan oleh masyarakat desa.

Desa Kubu. Desa Kubu merupakan satu-satunya desa yang memiliki bentang alam gambut dan mangrove sekaligus. Wilayah perairan sangat dominan menjadikan upaya peningkatan kapasitas dalam tata kelola perairan dan penanganan pasca panen produk perikanan secara ramah lingkungan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kegiatan kunci yang dilakukan di Desa Kubu adalah penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Tata Kelola Wilayah Perairan Desa. Hal ini dilakukan karena kegiatan lain terkait agroforestri dan hortikultura sudah dilakukan oleh mitra dari sektor swasta.

Penyusunan Perdes berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perikanan, dan Bappedalitbangda Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan ini juga melibatkan peran aktif sektor swasta dan NGO, yakni PT. Kandalia Alam, PT. EKL, dan Yayasan Blue Forest. Proses penyusunan perdes saat ini berada dalam tahap konsultasi antar para pihak di tingkat desa, dan selanjutnya akan dikonsultasikan ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Kubu Raya.

Selain kegiatan kunci yang telah dipaparkan di atas, di semua desa juga dilakukan pelatihan hortikultura yang dilakukan bekerja sama dengan PT. Panah Merah. Begitu juga dengan tata kelola lahan gambut, pelatihan tentang perlakuan lahan gambut telah dilaksanakan bekerja sama dengan Ir. Joko Wiryono selaku instruktur pelatihan pertanian tanpa bakar dari BRGM.



Gambar 16. (a-c) Pelatihan budidaya kopi liberika dalam sistem agroforestri dan Gambar (d) pelatihan pengolahan pascapanen kopi di Desa Permata



Gambar 17, Demoplot agrosilvofishery Desa Sungai Radak Dua



Gambar 18. (a) Pelatihan budidaya tanaman secara agroforestri, Gambar (b) pelatihan pembuatan pupuk organik dan di Desa Kubu

Paket Kerja-4

Paket Kerja Empat melakukan kegiatan untuk mengidentifikasi potensi skema pembiayaan tata kelola gambut yang ramah lingkungan dan lestari. Paket Kerja ini berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Bappedalitbang, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup, sektor swasta, dan NGO lokal.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan bersama para pemangku, yang meliputi Badan/OPD Teknis, sektor swasta, dan NGO/LSM, terhadap berbagai skema pendanaan inovatif di Kabupaten Kubu Raya disepakati bahwa TJSL merupakan salah satu sumber pendanaan yang memiliki posisi cukup baik untuk mendukung pengelolaan gambut lestari. Inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Kubu Raya saat ini diatur dalam Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.



Gambar 19. Kegiatan Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Kubu Raya



Gambar 20. Pengukuran di lapangan



Gambar 21. Kegiatan Pelatihan Inventarisasi GRK Lahan Gambut

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perda tersebut, sudah dilakukan kegiatan untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah yang mendukung pelaksanaan TJSL, melalui serangkaian kegiatan *workshop* dan FGD terkait TJSL di lingkungan sektor swasta. Hasil dari rangkaian kegiatan tersebut adalah disepakatinya revisi Peraturan Bupati (Perbup) dan revitalisasi forum TJSL. Sebagai salah satu hasil dari proses tersebut adalah terbitnya revisi Perbup Nomor 20 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum TJSL Perusahaan Kabupaten Kubu Raya. Dalam Perbup ini juga sudah mulai diatur bagaimana peran TJSL untuk mendukung kegiatan dalam pengelolaan gambut berkelanjutan

Paket Kerja-5

Paket Kerja Lima berkontribusi dalam membangun kapasitas nasional dalam penghitungan emisi dari lahan gambut. Bagian dari proyek yang diselenggarakan oleh

BPSI Tanah dan Pupuk dan Para Peneliti BRIN adalah mengevaluasi emisi CO₂ dari beberapa tipe tutupan lahan yang bertujuan untuk menghasilkan faktor emisi baru. Paket Kerja Lima berfokus pada peningkatan kapasitas dalam perhitungan emisi lahan gambut. Paket Kerja ini bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Peneliti Para Peneliti BRIN di tingkat nasional, sementara di tingkat daerah berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Bappedalitbang Kubu Raya, OPD Teknis, serta pemerintahan desa.

Capaian kunci paket kerja ini adalah diperolehnya data dan pengetahuan baru berdasarkan pengamatan lapangan terkait perhitungan emisi dari pengelolaan lahan gambut, dan perhitungan penurunan emisi dari kegiatan restorasi/pemulihan lahan gambut. Untuk melakukan kegiatan ini telah dilakukan pemasangan alat dan pemantauan lapangan sejak tahun 2022. Pemasangan alat pemantau dilakukan di tiga desa, yaitu Desa Teluk Bakung, Desa Muara Baru, dan Desa Sungai Asam. Saat ini, perhitungan emisi sudah memasuki tahap akhir, dan telah dihasilkan beberapa temuan dan berbagai kegiatan dalam rangka pelatihan.

Kontribusi lain yang diberikan adalah dalam pengembangan pedoman inventarisasi GRK. Berbagai proses penyusunan brosur sebagai informasi praktis mengenai gambut dan pengelolaan gambut berkelanjutan telah dihasilkan. Diseminasi dalam bentuk publikasi ilmiah, keikutsertaan dalam seminar nasional dan internasional juga telah dilaksanakan. Dalam kegiatan peningkatan kapasitas pelatihan inventarisasi GRK dan pengelolaan gambut berkelanjutan telah diselenggarakan, berbagai diskusi kelompok terfokus mengenai cara pengelolaan lahan gambut yang lebih baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional.

Paket Kerja-6

Paket Kerja 6 berkaitan dengan pengembangan pendekatan dan koordinasi dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Capaian kunci paket kerja ini adalah Muatan Lokal (Mulok) Gambut dan Mangrove dan Komunitas WikiGambut. Muatan Lokal Gambut dan Mangrove Kabupaten Kubu Raya merupakan muatan lokal pertama di Indonesia yang secara khusus membahas tentang gambut dan mangrove. Proses pengembangan muatan lokal ini berlangsung dalam rentang waktu 2022-2023, di mana Peat-IMPACTS bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya bersama BRGM, dan beberapa mitra pembangunan yang bekerja di Kabupaten Kubu Raya, para ahli, dan akademisi dari perguruan tinggi di Kalimantan Barat.

Tim Penyusun muatan lokal ini terdiri guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini, Proyek Peat-IMPACTS dan para pihak termasuk para ahli berperan sebagai fasilitator.

Dengan demikian, produk muatan lokal ini merupakan hasil karya guru-guru yang dirangkum dalam Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Muatan Lokal Gambut dan Mangrove.

WikiGambut merupakan komunitas para pihak yang peduli terhadap permasalahan lahan gambut di Kalimantan Barat, yang terdiri dari berbagai profesi dari berbagai daerah (tidak hanya Kubu Raya dan Kota Pontianak). Produk dari WikiGambut ini adalah berbagai tulisan yang bersifat opini, *feature* dan cerita pengalaman pengetahuan gambut, dalam bentuk laman *website* **WikiGambut.id**. Wiki gambut diharapkan memotret secara lengkap dari berbagai sisi terkait pengelolaan gambut, dan diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak dalam pengelolaan gambut.



Gambar 22. Peluncuran kurikulum muatan lokal gambut dan mangrove di Kabupaten Kubu Raya



Gambar 23. Instruksi Bupati dan Peraturan Bupati Kubu Raya terkait implementasi mulok gambut di Kubu Raya



Gambar 24. Kegiatan Tour Kampus, Bincang Gambut, Edukasi WikiGambut, dan bedah artikel

Paket Kerja Enam juga bertugas untuk mendiseminasi berbagai hasil pelaksanaan proyek secara lebih luas dan berguna dalam konteks pembangunan di daerah. Terdapat beberapa kegiatan diseminasi dan dukungan yang telah di berikan meliputi Festival Budaya Kalimantan Barat, pameran hasil lahan gambut dan berbagai kegiatan lain baik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten Kubu Raya.

Evaluasi dan Keberlanjutan

Program Peat-IMPACTS Indonesia sudah berlangsung hampir lima tahun di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Kubu Raya. Tentu saja masih banyak kegiatan dan kolaborasi bersama berbagai pihak yang perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, baik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten Kubu Raya. Beberapa hal terkait yang perlu dicatat sebagai upaya untuk meningkatkan aspek keberlanjutan dituangkan di beberapa butir di bawah ini.

1. Dokumen Peta Jalan Gambut Lestari (PEGARI) telah disusun melalui pendekatan inklusif dan partisipatif, mencakup 27 desa yang berada di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Kapuas-Sungai Ambawang dan KHG Sungai Terentang - Sungai Kapuas. PEGARI dapat menjadi referensi penting dalam perencanaan di tingkat desa, khususnya dalam upaya perlindungan ekosistem gambut berkelanjutan.
2. Diperlukan kelanjutan berbagai upaya pengarusutamaan muatan RPPEG (Provinsi dan Kabupaten) ke dalam; (1) proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah baik di tingkat provinsi dan kabupaten, (2) kebijakan tata kelola SDA di Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya, mengingat luasnya area gambut terhadap area wilayah, dan (3) rencana kelola/usaha berbagai pemangku kepentingan terkait dalam penggunaan lahan di provinsi dan kabupaten.
3. Beberapa kegiatan percontohan di tingkat desa dapat menjadi pemicu berbagai kegiatan lanjutan dan potensi replikasi di desa-desa lain. Saat ini terdapat potensi pengembangan lebih lanjut sebagai berikut.
 - **Budidaya Kopi.** Di lokasi demo plot telah memiliki tanaman kopi yang ada sebelumnya, sehingga perlu dilakukan revitalisasi dari segi pengetahuan dan pemahaman tata kelolanya. Dari sisi pasar, hasil implementasi proyek menunjukkan bahwa para mitra berkomitmen untuk melakukan pendampingan dan pemasaran dengan menggunakan "brand" dari masing-masing desa.
 - **Karet.** Terdapat potensi dan prospek pasar dengan adanya kesediaan pihak mitra dalam kemitraan yang dibuktikan dengan

melakukan pendampingan dan menampung hasil panen sesuai dengan kriteria dan kualitas yang disepakati, sebagaimana yang berlangsung di Desa Bengkarek. Sehingga perlu dipertimbangkan perluasannya ke desa-desa potensial lainnya yang masih memiliki perkebunan karet di Kabupaten Kubu Raya.

- **Agrosilvofishery.** Bidang ini memiliki potensi besar, dengan semangat desa yang telah mengalokasikan lahan seluas 30 hektare. Di dalam satu hamparan lahan desa tersebut, telah berdiri SMKN Pertanian yang dapat memperkuat sinergi dalam pengembangan pertanian desa. Sehingga kolaborasi antar instansi dengan dunia pendidikan akan memperkuat upaya praktik penerapan *agrosilvofishery* secara kolaboratif, terlebih apabila dikaitkan dengan program ketahanan pangan yang telah dirancang oleh desa.

- 4 Dalam rangka mewujudkan ekosistem gambut yang lestari, dibutuhkan intervensi yang konsisten didukung dengan sumber pendanaan yang memadai. Skema pendanaan inovatif yang berhasil diidentifikasi selama ini, diharapkan dapat terus mendorong keberlanjutan kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, baik di tingkat

provinsi, kabupaten, hingga ke tingkat tapak. Dalam hal ini, Bappeda memiliki peranan yang penting untuk memastikan segala prosesnya terintegrasi dengan baik dalam proses perencanaan daerah.

- 5 Pada tahapan berikutnya, kurikulum muatan lokal gambut yang telah diterapkan pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Kubu Raya diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan diadopsi oleh kabupaten-kabupaten lainnya di Kalimantan Barat yang memiliki ekosistem gambut. Sementara itu, Wikigambut juga diharapkan dapat konsisten menjadi *platform* berbagi pengetahuan tentang gambut serta semakin berkembang dan inovatif dari segi komunitas maupun media berbagi.

Demikian beberapa capaian kunci yang dihasilkan dari implementasi proyek Peat-IMPACTS Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat. Tentu saja masih banyak kegiatan dan kolaborasi bersama dengan berbagai pihak yang perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, baik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten Kubu Raya. Keberhasilan berbagai kegiatan merupakan peran aktif dari para pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dan bekerja sama dari berbagai keterbatasan, sehingga tujuan bersama untuk mencapai keberlanjutan tata kelola gambut di Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat dapat terwujud.

Penutup

ICRAF Indonesia bersama semua mitra, sebagai pelaksana Peat-IMPACTS Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dan para pemangku kepentingan, serta masyarakat secara keseluruhan, yang telah menjalin kerja sama dengan baik selama proyek berjalan. Sebagai lembaga penelitian yang melakukan kegiatan penelitian aksi, semua hasil disesuaikan dengan cara kerja dan kebutuhan di tingkat lapangan. Produk akhir dari kegiatan proyek adalah sistem atau model yang merupakan hasil pembelajaran dari implementasi program, yang bertujuan membangun dan meningkatkan kapasitas yang memadai dalam pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan dan kerangka kerja dan implementasi di tingkat lapangan disesuaikan dengan rencana kerja yang telah disusun dan disepakati dengan para pemangku yang relevan dari proses awal perencanaan proyek ini.

Sitasi

Hendrawan H, Sumantri I, Benita T, Rahayu S, Pandiwijaya A, Leimona B, Mufida A, Atikah T, Johana F, Ekadinata A. 2024. *Rekam Jejak #PahlawanGambut-Kalimantan Barat: Ringkasan Upaya Peningkatan Pengelolaan Lahan Gambut dan Kapasitas Pemangku Kepentingan melalui Peat-IMPACTS Indonesia*. Bogor, Indonesia: CIFOR-ICRAF Program Indonesia.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia | Tel: +(62) 251 8625 415
Email: icraf-indonesia@cifor-icraf.org | www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia



Supported by:



#PahlawanGambut
pahlawangambut.id

based on a decision of
the German Bundestag